



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KENDAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSDALIFAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 463090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah Seluas 2310 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 205.000.000
2. Tanah Seluas 555 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 123 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah Seluas 115 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO K1H02N14LO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 792.200.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 692.200.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.